

PEMETAAN POTENSI SEKOLAH INKLUSIF BERBASIS WELCOMING SCHOOLS UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN LUAR BIASA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

¹⁾**Khausar. M.Si**

¹Dosen Prodi PGSD STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Abstrak

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh 10 tahun silam telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah di dunia pendidikan, yaitu bertambahnya jumlah murid dengan status anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal sampai saat ini keberadaan sekolah yang mengakomodasi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat kurang. Padahal hak anak didik masih banyak yang belum terpenuhi, apalagi anak yang berstatus sebagai anak ABK. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi sekolah yang dapat dijadikan sebagai pelaksana sekolah inklusif yang berbasis welcoming school untuk semua anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengambil populasi semua sekolah dasar di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian diambil sampel satu sekolah yang merepresentasikan jumlah sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesan kurang siap pihak sekolah dan pemerintah dalam pelaksanaan sekolah inklusif bagi ABK di Kabupaten Abdy. Berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, bukan berarti pelaksanaan pendidikan inklusif tidak dapat diaplikasikan. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu adanya sistem dukungan. Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang jelas mengenai pendidikan inklusif. Sebagai upaya untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan sinergitas berbagai komponen masyarakat, para ahli, dan ketersediaan fasilitas yang mendukung akselerasi atau percepatan program Pendidikan Inklusif. Oleh karena itu, pembentukan kelompok kerja Pengembangan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Abdy menjadi sangat penting sebagai forum advokasi dan penggerak percepatan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Abdy.

Kata kunci: *sekolah inklusif, welcoming school, ABK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa bencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh 10 tahun silam telah menimbulkan berbagai dampak. Kondisi yang muncul sebagai akibat bencana tersebut antara lain kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik ataupun kondisi-kondisi lainnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah propinsi Aceh telah melakukan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan pemerintah propinsi Aceh telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota (RPJMK) untuk Aceh dan Kabupaten/Kota. Urusan pendidikan merupakan salah satu prioritas sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, 20 % APBA dan APBK termasuk dana Otsus harus dialokasikan untuk pendidikan.

Mengutip paparan yang disampaikan Anas M. Adam selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Hasil pembangunan, khususnya aspek akses pendidikan di Aceh sudah sangat baik, ini terlihat dari angka partisipasi pendidikan (APK) SMA/MA/SMK di Aceh tahun 2011 yang telah mencapai 84,11 % dan sudah melampaui target nasional 2014 yang ditargetkan 79 %, APK SLTP Aceh yang sudah mencapai 102,82 % dan APM 72,81 %. Demikian juga dengan APK SD/MI mencapai 113,27 %, APM SD/MI yang telah

mencapai 94.67 %. Sisa masalah yang terjadi adalah pada angka partisipasi kasar TK/Ra yang baru mencapai 27,63 % dari target yang direncanakan 45 %. Di samping masalah angka partisipasi TK/RA, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan pada akses yaitu: (1) Perhatian kepada keluarga miskin untuk pendidikan menengah masih sulit, (2) Akses untuk anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus masih sangat kurang. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SLB, belum mempunyai program pendidikan inklusi, belum mempunyai dana khusus untuk SLB, belum mempunyai program khusus untuk daerah terpencil dan terpencar (3) Akses dan mutu SMK memerlukan perhatian khusus oleh Kabupaten/Kota.

Hampir semua Kabupaten/Kota dalam tahun terakhir menempatkan dana melebihi 20 % dari APBK untuk pendidikan. Namun kalau dirinci lebih lanjut yang menjadi dan patut diperhatikan adalah semua daerah menghabiskan sebahagian besar dana untuk gaji guru. Rata-rata kabupaten /kota menggunakan 67 % anggaran pendidikan untuk gaji guru, malah ada kabupaten/kota yang menghabiskan dana pendidikan melebihi dari 85 % untuk gaji guru, sebaliknya sangat minim untuk peningkatan kualitas. Untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan maka ada beberapa kebijakan yang harus ditempuh, diantaranya:

- a. Pemerintah Aceh mewajibkan alokasi dana untuk *in-service* dalam rangka peningkatan mutu guru dari APBA dan APBK,
- b. meningkatkan kualifikasi guru,
- c. memperlengkapi laboratorium, buku dan perpustakaan sekolah,
- d. menata kembali kurikulum yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan pengembangan model sekolah yang dapat menjadi contoh dan model bagi sekolah lain.

Bidang akses pendidikan yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh ke depan adalah melengkapi sarana dan prasarana pendidikan kejuruan, dan pendidikan untuk anak keluarga miskin dan daerah terpencil/terpencar. Kabupaten dan Kota pemekaran atau Kabupaten induk yang telah dimekarkan banyak yang tidak mempunyai SLB, sehingga tidak dapat mengembangkan program inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus karena tidak mempunyai sekolah pembina, pembangunan sekolah dan penyediaan guru untuk anak berkebutuhan khusus seperti SLB, pendidikan inklusi menjadi mutlak dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah "Bagaimanakah Pemetaan Potensi Sekolah *Inklusif* Berbasis *Welcoming Schools* Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Luar

Biasa Kabupaten Aceh Barat Daya,?".

C. Tujuan dan Target Luaran

Salah satu sekolah yang saat ini fokus kepada pendidikan luar biasa adalah SDN Luar Biasa (LB) Susoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya. Saat ini beberapa program telah dilaksanakan di sekolah ini, namun demikian masih banyak hal-hal yang perlu dievaluasi dalam pembenahan. Untuk itu diperlukan sebuah pemetaan sekolah berbasis *welcoming school* untuk mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK). Konsep sekolah berbasis *welcoming school* ini dimaksudkan untuk menjadikan sekolah umum dapat menampung ABK di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sehingga secara lebih khusus, di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat diidentifikasi secara komprehensif kondisi sekolah yang mungkin dapat dijadikan model sekolah inklusi. Sehingga dapat di harapkan nantinya akan berguna bagi pemerintah dan dinas terkait untuk menentukan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang rinci dan detail untuk dasar pengambilan keputusan pihak dari berbagai pemerintah dan dinas terkait.

Secara umum identifikasi pemetaan sekolah berbasis *welcoming school* untuk anak ABK dimaksudkan untuk menemukan sekolah yang potensial dan prospektif untuk nantinya dikembangkan menjadi sekolah

inklusif. Hal ini akan berdampak pada kemudahan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk melakukan langkah-langkah strategis. Lebih jauh penelitian ini akan mendasari pelaksanaan program strategi pendidikan di kabupaten Aceh Barat Daya.

Dari upaya pemetaan ini, pada gilirannya dampak implementatifnya adalah adanya peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun tujuan dari melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk melakukan identifikasi sekolah yang dapat dikembangkan menjadi sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Menentukan potensi untuk prioritas pengembangan sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
3. Mengembangkan sekolah yang berpotensi, untuk dijadikan sebagai model sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Barat Daya.

Target yang ingin dicapai:

1. Teridentifikasinya sekolah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai model sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

2. Tersedianya informasi sekolah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai model sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kemudian, informasi ini diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dan dinas terkait sebagai tindak lanjut.
3. Informasi dan data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk melakukan identifikasi permasalahan kependidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey literatur dan studi lapangan untuk mengidentifikasi dan menetapkan industri kecil mana yang potensial dikembangkan di desa vokasi berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan. Pendekatan survey lapangan digunakan untuk identifikasi kriteria dan sub kriteria untuk pencapaian solusi, serta untuk keperluan assessment untuk pencapaian solusi.

E. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Kajian literatur terkait Perumusan Masalah, Identifikasi Kriteria Sekolah Inklusif dengan Indepth Interview, Desain Studi, Data Coding Sekolah Inklusif Dengan

Assessment, Analisis Data, Peta Potensi Sekolah Inklusif.

C. Unit Analisis

Pada penelitian ini sebagai unit analisis adalah sekolah umum yang berpotensi menjadi pelaksana sekolah inklusif berbasis *welcoming school*. Dipilihnya sekolah-sekolah ini karena mereka mempunyai kesiapan lebih matang dibandingkan sekolah lainnya, dan apa yang mereka lakukan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif secara langsung berpengaruh pada keberadaan ABK. Oleh karenanya, evaluasi penilaian sekolah ini secara mendalam dapat menjadi gambaran yang cukup komprehensif mengenai potensi sekolah pelaksana sekolah inklusif berbasis *welcoming school*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Studi Lapangan dengan *Indepth Interview*

Studi ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pelaku pendidikan di sekolah. Pelaku pendidikan ini antara lain: Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Aceh Barat Daya, kepala sekolah terpilih, ketua kelompok kerja sekolah, ketua kelompok guru, pendidik umum maupun khusus. *Indept interview* ini ditujukan untuk merumuskan kriteria dan sub kriteria

untuk penetapan pelaksana sekolah inklusif berbasis *welcoming school*.

2. Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden potensial, yaitu para kepala sekolah dan stakeholder yang berkompeten. Data yang berhasil dikumpulkan digunakan untuk keperluan penilaian (*assessment*) terhadap alternatif-alternatif yang tersedia berdasarkan kriteria-kriteria dan sejumlah sub kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian yang dilakukan adalah dengan menentukan beberapa kriteria yang telah dirumuskan pada tahap awal.

3. Model Relasi Didaktik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan potensi sekolah yang ada di kabupaten Aceh Barat Daya. Pemetaan yang dilakukan berpedoman pada Model Relasi Didaktik yang disusun oleh Bjørndal dan Lieberg (Berit H. Johnsen). Model ini menggunakan pedoman pada delapan bidang atau aspek utama kurikulum yang saling terkait secara berkesinambungan dan juga terkait dengan bakal pengguna alat professional, yaitu guru reguler dan guru pendidikan kebutuhan khusus. Aspek-aspek utama KBM itu adalah:

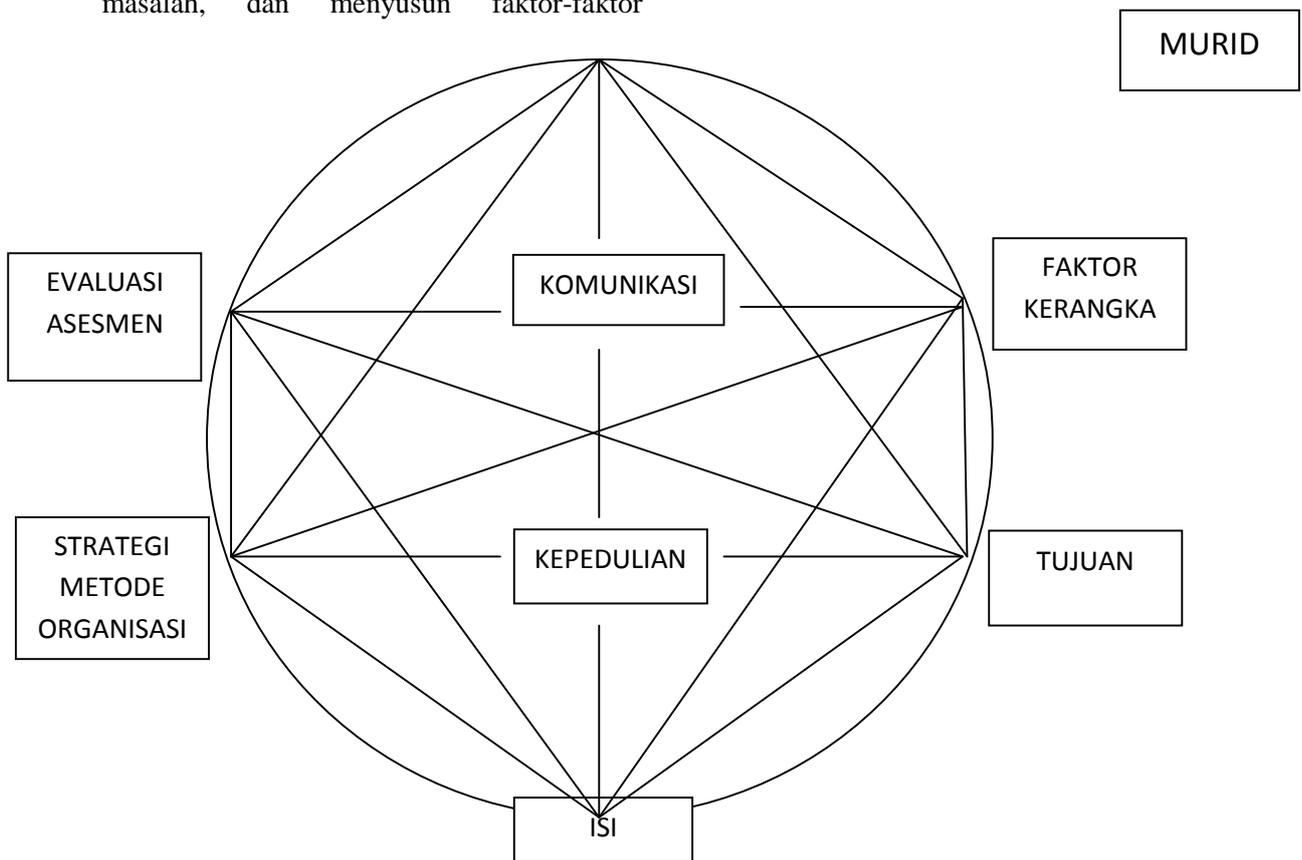
Siswa, Faktor kerangka kerja, Tujuan, Isi, Strategi dan metode serta pengorganisasian, asesmen dan evaluasi,

komunikasi, kepedulia. Bagian-bagian berikut ini setiap aspek tersebut dapat divisualisasikan:

A. Teknik Analisis

Rujukan analisis dalam penelitian ini adalah model analisis yang di jelaskan oleh Saaty. Analisis ini kemudian disebut dengan analisis deskriptif dengan dukungan *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. AHP adalah metode membagi permasalahan kompleks dan tidak terstruktur menjadi komponen komponen atau faktor dari masalah, dan menyusun faktor-faktor

tersebut menjadi suatu susunan berjenjang atau hierarki. Selanjutnya, nilai numerik diberikan untuk setiap faktor secara subyektif terhadap, menilai kepentingan relatif dari faktor faktor tersebut berdasarkan nilai numerik yang diberikan dan mensintesis penilaian untuk faktor mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi solusi (Saaty, 1994). Tahapan analisis dengan AHP adalah sebagai berikut:



a. Menentukan sasaran utama.

Penelitian ini tujuan pokoknya adalah pemetaan potensi sekolah inklusi

berbasis *welcoming school* di Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Menyusun hirarki

Sasaran utama sistem ditempatkan pada level teratas hirarki. Level berikutnya terdiri dari kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai atau mempertimbangkan alternatif-alternatif

maupun nonteknis dan dari hasil penelitian ini.

B. Survey Lapangan

Survey lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk berkompeten.

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unsur atau item yang akan diteliti atau yang akan diukur karakteristiknya, yang membentuk suatu himpunan tertentu berdasarkan sekurang-kurangnya satu kriteria kesamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua sekolah dasar/madrasah ibtdaiyyah negeri yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah sekolah dasar negeri di Kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 134 sekolah dasar/madrasah ibtdaiyyah negeri. Sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya ada 9 Kecamatan.

Sampel adalah sembarang bagian yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sekolah dasar/madrasah ibtdaiyyah yang memiliki komitmen terhadap pelaksana sekolah inklusif, barulah

yang ada dan menentukan alternatif alternatif tersebut.

c. Menentukan prioritas

Prioritas utama dalam menentukan pelaksana sekolah inklusif adalah sekolah yang paling siap secara teknis mendapatkan data primer mengenai informasi-informasi subyektif dari responden utama. Pelaksanaan survey ini adalah dengan menyebar kuesioner ke sejumlah responden yang dianggap

Kemudian diambil sampel satu sekolah yang merepresentasikan jumlah sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mengingat keterbatasan peneliti yang fokus “menggarap” ABK sebagai bagian dari anak yang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

b. Metode Pengukuran

Responden diminta mengisi *form* yang telah disusun tim peneliti dan dengan hasil *indepth interview* yang dihasilkan, kemudian dibuat prioritas-prioritas utama. Setelah itu barulah diketahui susunan hierarchi yang terbentuk dari sekian sekolah yang diteliti. Pada tahap selanjutnya, sekolah yang mendapat prioritas utama akan direkomendasikan untuk menjadi pelaksana sekolah inklusif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Data

Pada bagian ini tahapan penelitian memasuki pada tahapan analisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu untuk menentukan sasaran utama dan menyusun hirarki, berdasarkan beberapa kriteria pemenuhan sekolah inklusif. Secara terperinci, kriteria tersebut dijabarkan melalui program dan strategi pembelajaran ABK di Kabupaten Abdy a :

1. Menentukan sasaran utama.

Penelitian ini tujuan pokoknya adalah pemetaan potensi sekolah inklusi berbasis *welcoming school* di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekolah inklusif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada Permendiknas No 70, tahun 2009. Model sekolah ini adalah sekolah yang mengakomodasi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran di sekolah reguler, atau umum. Tujuannya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

2. Menyusun hirarki

Dari hasil penelitian, dalam menentukan *top hierarchi* adalah sekolah yang paling mendekati kriteria sebagai sekolah inklusif. Kriteria yang dimaksud adalah syarat yang

dikembangkan oleh Suparno dkk (2007: 2-23) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

a. Keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) itu sendiri.

Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua anak didik sekolah reguler baik yang normal maupun yang di anggap khusus. Sedangkan secara khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah setiap peserta didik yang memiliki kelainan, yang dapat di klasifikasikan antara lain:

- 1) Tunanetra
- 2) Tunarungu
- 3) Tunawicara
- 4) Tunagrahita
- 5) Tunadaksa
- 6) Tunalaras
- 7) Berkesulitan belajar
- 8) Lamban belajar
- 9) Autis
- 10)Memiliki gangguan motorik
- 11)Menjadi korban korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
- 12)Memiliki kelainan lainnya
- 13)Tunaganda

Dari sekian banyak klasifikasi yang ada, sekolah sekolah luar biasa yang ada, hanya sebagian peserta didik yang dapat diakomodir.

b. Komitmen sekolah terhadap konsep pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggungjawab atas terciptanya suasana tersebut. Namun pada kenyataan di lapangan, sekolah luar biasa yang dianggap tempat anak yang ABK justru mengklasifikasikan kedalam kelompok yang khusus dan cenderung membatasi sosialisasi peserta didik yang seharusnya dapat berkembang baik di dalam komunitas sekolah reguler yang heterogen.

Hal ini karena sekolah luar biasa memang masih terikat dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Padahal sekolah reguler di Kabupaten Aceh Barat Daya belum teridentifikasi secara prosedural sekolah yang berkomitmen untuk mengikrarkan diri sebagai sekolah inklusif.

c. Manajemen sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Manajemen dalam hal ini adalah administrasi atau pengelolaan, yaitu usaha untuk mendayagunakan sumber yang ada secara efektif untuk mencapai tujuan sekolah.

Kepala sekolah sebaiknya mempunyai kemampuan manajerial untuk memaksimalkan sumberdaya yang ada. Tidak kalah pentingnya adalah mampu mengembangkan kurikulum bagi peserta didik yang berkebutuhan

khusus, agar memiliki *life skill* ketika sudah lulus nanti.

Dari hasil penelitian awal, dari lima kepala sekolah yang diwawancarai, hanya ada satu kepala sekolah yang mempunyai komitmen dan apresiatif terhadap konsep sekolah inklusif. Hal ini karena di sekolahnya terdapat siswa yang ABK. Sehingga kepala sekolah merasa memiliki tanggung jawab lebih terhadap keberhasilan anak didiknya tersebut.

d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana pendidikan inklusif membutuhkan perencanaan dari berbagai stakeholder. Lebih khusus lagi stakeholder yang berperan di lingkungan sekolah, harus mempertimbangkan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus.

Contoh sarana prasarana yang wajib dipertimbangkan sekolah inklusif misalnya tempat parkir khusus murid ABK, lokasinya paling strategis, terdepan, paling mudah diakses, paling lebar, tidak ada penghalang, dan langsung dapat menuju pintu utama. Jika ada siswa yang normal memanfaatkan fasilitas tersebut, langsung mendapat tindakan.

Contoh lain adalah ruangan toilet yang dibuat dengan ukuran yang lebih besar, lebih dekat dengan akses pintu keluar masuk, pintunya dibuat

melintang, sehingga mudah diakses. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang mendukung siswa berkebutuhan khusus dalam proses belajar juga harus tersedia. sarana dan prasarana ini disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih juga mutlak dibutuhkan. Karena guru merupakan tokoh utama dalam memberikan kesempatan anak ABK untuk dapat mengakses sarana pendidikan dan berkembang dalam lingkungan yang heterogen.

Dari uraian tersebut di atas, hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan sebagian besar atau bahkan belum ada sekolah reguler yang memenuhi kebutuhan anak ABK. Sementara itu, di sekolah luar biasa cenderung lebih terkonsep dengan baik. Meskipun membutuhkan tambahan atau perbaikan lagi.

e. Ketenagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif.

Penelitian awal yang dilakukan terhadap sekolah reguler terpilih, menunjukkan bahwa masih lazim terjadi pandangan miring dari siswa lain terhadap siswa ABK. Hasil wawancara terhadap beberapa siswa, diketahui sering terjadi ucapan, perlakuan, atau hinaan terhadap siswa ABK. Hal ini menunjukkan belum terwujudnya

ketenangan lingkungan dalam pelaksanaan sekolah inklusif.

Selain itu, kemampuan guru dalam mengakomodasi kebutuhan siswa ABK belum optimal. Hal ini dapat dilihat model pembelajaran yang mengharuskan semua siswa untuk berkompetisi satu dengan yang lainnya. Padahal, prinsip sekolah inklusif adalah menghargai keistimewaan masing-masing individu untuk saling bekerjasama dalam proses belajar. Sehingga terwujud suasana yang saling melengkapi antar siswa.

a. Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pendidikan inklusif di kabupaten Abdaya, menurut hasil penelitian awal sesungguhnya sudah diimplementasikan di beberapa sekolah reguler yang memiliki siswa ABK. Namun pelaksanaan dan existensinya masih sporadic dan terkesan tidak terkonsep secara matang dari dinas atau stakeholder terkait.

Advokasi dan pendampingan terhadap program penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan komitmen dari berbagai institusi. Merujuk pada kota lain sebagai dasar penerapan dan perbandingan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta. Institusi yang mendukung bidang advokasi pendidikan

inklusif antara lain pemerintah kota Surakarta, Asosiasi Pendidikan Inklusif dan Kelompok Kerja Guru Sekolah Inklusif.

Bentuk advokasi dan pendampingan program berupa pengembangan jejaring dengan satuan pendidikan khusus (SLB), klinik terapi di wilayah Surakarta dan penguatan kompetensi guru pendamping khusus serta pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus melalui berbagai even lomba, apresiasi, beasiswa.

pembahasan dan analisis data yang dihimpun melalui observasi di lapangan dan selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian tentang pengembangan sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di kabupaten Abdaya.

Adapun *goals* dari penelitian ini akan mengerucut pada beberapa target capaian, antara lain:

1. Identifikasi sekolah yang dapat dikembangkan menjadi sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam

satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya. Pendidikan inklusif menghendaki jaminan pendidikan bagi semua siswa tanpa terkecuali.

Namun, hambatan-hambatan tengah dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia sehingga belum dapat diterapkan secara maksimal. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa 70% Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak memperoleh jaminan pendidikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif di antaranya : 1. Kurikulum yang tersusun kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memerhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusif tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi. Kurikulum pendidikan inklusif harus masuk dalam kurikulum arus utama. Inisiatif para *stakeholder*, guru dan sekolah, serta masyarakat masih parsial terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga akses Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengenyam pendidikan masih begitu sempit. 2. Kebijakan yang kurang

mendukung, kebijakan pemerintah memisahkan komponen pendidikan khusus ini, harusnya tidak lagi dibedakan. Pendidikan Inklusif sudah bukan lagi tambahan, tetapi masuk dalam pengaturan umum. 3. Kurangnya ketersediaan anggaran, minimnya anggaran yang di sediakan pemerintah adalah sisi lain akibat tidak adanya dukungan kebijakan pemerintah. 4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). 5. Paradigma atau pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusif memang belum populer. Masyarakat hanya disibukkan dengan urusan meningkatkan kualitas pendidikan secara *horizontal* maupun *vertical*. Sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan yang terbatas ini sering termarginalkan (kaum yang tersisih). Pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana dan prasarana yang cukup besar tetapi bukan harus ditinggalkan karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus meninggalkan persepsi konvensional bahwa anak dengan kebutuhan terbatas misalnya untuk anak tunanetra hanya dicetak menjadi tukang pijit. Masalah-masalah tersebut pada dasarnya berakar pada rendahnya komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan. Kegiatan studi banding dan pelatihan dapat menjadi solusi untuk

mengatasi akar masalah pendidikan inklusif di Indonesia. Studi banding ke daerah-daerah yang sukses dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat meningkatkan kesadaran dan wawasan mengenai pendidikan inklusif. Selain studi banding, kegiatan pelatihan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan dan komitmen para praktisi dan para pengambil keputusan pendidikan. Komitmen para praktisi dan pengambil kebijakan dapat meningkat apabila program pelatihan pendidikan inklusif memuat internalisasi nilai-nilai inklusif.

Identifikasi terhadap sekolah yang akan dilakukan adalah dengan membuat check list untuk menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Melakukan pendataan dengan membentuk tim pendataan PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di masyarakat berkolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah desa atau kelurahan sampai dengan jajaran paling bawah ditingkat RT, BKKBN, Tim Penggerak PKK, dan sebagainya. Pelaksanaan pendataan atau penjarangan (Screening) ABK, selanjutnya mengadministrasi hasil pendataan kemudian dilanjutkan validasi data

sebagai dasar atau acuan penentuan potensi penyelenggara pendidikan inklusif dan pusat sumber. Pusat sumber idealnya mempunyai bangunan sendiri yang dibangun pemerintah dan atau masyarakat (swasta) yang digunakan khusus sebagai pusat sumber, namun dalam rangka efektifitas dan efisiensi, pelaksana pusat sumber yang ada di Indonesia banyak menggunakan SLB yang telah ada, SLB yang dijadikan pusat sumber disebut Centra PK (Pendidikan Khusus) dan PLK (Pendidikan Layanan Khusus).

Kesiapan sekolah dengan komitmen yang kuat dimulai dari sistem penerimaan siswa baru di sekolah yang non diskriminasi dan akomodatif bagi semua anak.

Sarana dan prasarana di lingkungan sekolah diadaptasikan agar lebih aksesibel bagi ABK (misalnya: Ramp tanda-tanda taktual), tersedianya peralatan khusus untuk memungkinkan ABK dapat mengakses semua kegiatan kurikuler (misalnya : Braille).

Tenaga didik sekolah yang cukup, termasuk standart minimal satu Guru Pembimbing Khusus (GPK) harus dipenuhi pada setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan dengan kualifikasi akademik serta kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasional standart.

Manajemen sekolah membentuk Tim Pendidikan Inklusif ditingkat sekolah melalui forum rapat koordinasi (Kepala Sekolah, Guru, Tenaga lainnya, komite sekolah, Unsur dinas pendidikan kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pusat sumber. Menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, melakukan sosialisasi pendidikan inklusif Intern (di sekolah) dan ekstern (di lingkungan sekitar sekolah atau masyarakat).

Pengembangan kurikulum sekolah yang fleksibel dengan menyiapkan PPI atau RPP modifikasi bagi ABK. GPK berkolaborasi dengan guru kelas dalam proses pengajaran di kelas dan tersedianya program ketrampilan kompensatoris bagi ABK. Dipergunakan berbagai strategi pengelolaan kelas oleh karena itu guru harus memiliki dan mengadaptasikan materi pelajaran dan metode pengajaran menurut kebutuhan setiap siswa dan masih banyak lagi.

Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dirinci lebih jauh dan mendalam untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

2. Menentukan potensi untuk prioritas pengembangan sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Setelah tahap satu di atas terlaksana, akan diketahui sekolah mana yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi sekolah model inklusif. Sekolah yang akan menjadi sekolah model adalah sekolah yang menempati hirarki teratas. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif disekolah model tersebut cenderung siap, terkonsep dan berjalan lebih mudah. Inilah yang nanti diharapkan menjadi *pilot project* pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Abdy.

Adapun kriteria dan persyaratan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sebagai berikut :

- a. Telah memiliki ijin operasional dari Pemkab/Kota
- b. Mampu merancang dan menggunakan kurikulum yang fleksibel
- c. Tersedia pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan prosedur operasi standar
- d. Tersedia sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan prosedur operasi standar
- e. Tersedia sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik
- f. Mendapat rekomendasi penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari

Pemkab/Kota dan ditetapkan sebagai sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif dari Pemprov.

Diperlukan juga modifikasi pembelajaran dalam setting Inklusi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, antara lain :

- 1) Guru memahami keberagaman karakteristik dan kompetensi anak
- 2) Guru dan anak belajar bersama secara aktif, inovatif, kreatif
- 3) Tugas pembelajaran disusun secara sederhana dan diwujudkan secara efektif dan efisien
- 4) Tugas diberikan lebih praktis dan memanfaatkan lingkungan sekitar
- 5) Peserta didik dilatih berani bertanya, menunjukkan perasaan dan mengemukakan pendapat secara bebas
- 6) Penilaian dilakukan variatif dan berkesinambungan dan jadi umpan balik pada anak

3. Mengembangkan sekolah yang berpotensi, untuk dijadikan sebagai model sekolah inklusif berbasis *welcoming school* untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di wilayah kabupaten Aceh Barat Daya.

Pada bagian ini akan lebih banyak berbicara tentang komitmen pemerintah untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini. Selain itu, dapat disampaikan juga kendala dan potensi yang ada di lapangan agar lebih tepat dalam

menentukan keputusan. Stakeholder dalam misi ini juga dapat diketahui setelah mempunyai gambaran pemetaan dan potensi pengembangan pendidikan inklusif di Kabupaten Abdy. Pemerintah membentuk suatu wadah (forum diskusi) profesional Guru, kepala sekolah, dan pengawas dengan tujuan sebagai berikut :

a. Strategi potensial dalam mempercepat pemberdayaan pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui program peningkatan kapasitas SDM

b. Peningkatan mutu pendidikan, faktor guru memegang peranan yang amat penting. Profesionalisme guru harus digalang secara sistematis melalui wadah-wadah pembinaan profesional guru.

Diharapkan melalui wadah profesional ini dapat meningkatkan motivasi, inovasi dan kreasi guru serta memiliki skill yang baik sehingga dapat memberikan layanan yang optimal kepada semua peserta didik (*Total Quality Services*) dan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan (*Total Quality Management*) khususnya dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan pemerintah antara lain :

1) Aktif dalam mensosialisasikan pendidikan inklusif

2) Menyelenggarakan diskusi/workshop/rapat koordinasi pendidikan inklusif

3) Menyusun *grand design* program pendidikan inklusif (kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar)

4) Merancang atau sharing memahami keberagaman peserta didik, identifikasi dan asesmen, PPI, dan PAKEM

5) Mengembangkan media adaptif

6) Menyusun Regulasi, kebijakan, panduan, juknis

7) Pengembangan model atau percontohan

8) Pemberian bantuan sosial

9) Penguatan pangkalan data dan informasi (PADATI)

10) Penghargaan, anugrah, festival, dan lain-lain

11) Pengembangan jejaring (*networking*)

12) Monitoring dan evaluasi.

D. Kesimpulan

Uraian yang telah dipaparkan di atas merupakan hasil dari analisis pengamatan awal. Dengan mengamati, membandingkan, mengidentifikasi, mempelajari, mengklasifikasikan dengan seksama, maka ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan yang cenderung lebih pada temuan kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah inklusif untuk pembelajaran ABK di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini menunjukkan adanya kesan kurang siap pihak sekolah dan pemerintah dalam pelaksanaan sekolah inklusif bagi ABK di Kabupaten Abdy, antara lain :

1. Jumlah sekolah dan siswa dalam suatu daerah/wilayah belum menunjukkan jumlah sebaran ABK, karena lemahnya dukungan pangkalan data dan informasi.

2. Peran sekolah luar biasa sebagai *support system* bagi sekolah inklusif belum optimal.

3. Kurangnya komitmen dari komponen sekolah terhadap pendidikan inklusif.

4. Kurangnya kolaborasi antar profesi dalam menangani anak berkebutuhan khusus.

5. Sistem sekolah yang terikat pada model segregasi.

6. Sarana dan prasarana belum aksesibel bagi ABK

7. Kurikulum sekolah yang belum adaptif.

8. Regulasi tentang pendidikan inklusif masih bersifat makro.

Berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, bukan berarti pelaksanaan pendidikan inklusif tidak dapat diaplikasikan. Karena jika tidak

segera dimulai sekarang, maka tidak akan ada proses penyempurnaan.

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan dalam upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua (*Education for All*). Sistem dukungan tersebut dapat berupa dukungan dalam bentuk regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang jelas mengenai pendidikan inklusif sebagai contoh dalam bentuk :

a. Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota mengenai pendidikan inklusif

b. Dukungan sarana dan prasarana

c. Dukungan pembiayaan atau alokasi anggaran

d. Dukungan tenaga (pendidik dan tenaga pendidikan)

e. Dan dukungan-dukungan dari lembaga pendukung yang lainnya

Sebagai upaya untuk mengembangkan Pendidikan Inklusif di kabupaten Aceh Barat Daya, diperlukan sinergitas berbagai komponen masyarakat, para ahli, dan ketersediaan fasilitas yang mendukung akselerasi atau percepatan program Pendidikan Inklusif. Oleh karena itu, pembentukan kelompok kerja Pengembangan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Abdy menjadi sangat penting sebagai forum advokasi dan penggerak percepatan Pendidikan

Inklusif di Kabupaten Abdy. Di samping itu, keberadaan pusat sumber mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1) Berinisiatif dan aktif melaksanakan pendidikan Inklusif

2) Memberikan dukungan (*support*) kepada sekolah-sekolah (Sekolah Umum dan Sekolah Luar Biasa) dalam pelaksanaan pendidikan inklusif

3) Sebagai pusat informasi dan inovasi di bidang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus/ Pendidikan Inklusif

4) Sebagai homebase Guru Pembimbing Khusus

5) Sebagai koordinator dalam pelayanan pendidikan inklusif

6) Berkolaboratif dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan implementasi pendidikan inklusif

7) Memberikan informasi/penerangan kepada sekolah-sekolah (sekolah umum dan SLB) mengenai pendidikan inklusif

8) Menyediakan bantuan asesmen yang rutin terhadap peserta didik berkebutuhan khusus

9) Memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus

10) Menjadi konsultan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi,

layanan, bimbingan, dan penanganan khusus

11) Mengadakan kerjasama dengan Dinas/Instansi/ LSM dalam upaya implementasi pendidikan inklusif

12) Melakukan inovasi di bidang Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif

13) Melakukan penelitian dan pengemb. implementasi pendd inklusif, serta strategi dan metode pembel. yang sesuai diterapkan pada layanan pendd bagi semua anak di dalam dan luar kelas.

14) Merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler, guru SLB serta pihak lain yg membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif atau pendidikan khusus

15) Melakukan penanganan layanan pendidikan. bagi peserta didik berkebutuhan khusus

16) Menyediakan (memproduksi) alat bantu mengajar/alat bantu khusus/media pembelajaran khusus lainnya untuk peserta didik berkebutuhan khusus

17) Menyediakan bantuan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada anak/peserta didik termasuk mereka yang berkebutuhan khusus

18)Menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif

19)Mengatur guru yang ada di SD LB untuk melakukan tugas tambahan sebagai GPK di Sekolah Umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Aspek-aspek tersebut diatas menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan. Untuk itu pemerintah seharusnya mendorong realisasi program-program pendukung pengembangan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Abdy.

DAFTAR PUSTAKA

Anas M. Adam , Pokja Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM, Bappeda Aceh dalam menyusun RPJMA 2012-2017 Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Abdurahman, M. (1988). *Pendidikan Luar Biasa Umum*. Jakarta: Depdikbud, Dirjen Dikti. Amin, M. (1997). *Orthopaedagogik anak Luar Biasa*. Jakarta: Dirjen Dikti, PPTG: Depdikbud.

Berit H. Johnsen. Kurikulum untuk Pluralitas Kebutuhan Belajar Individual. Beberapa Pemikiran mengenai Inovasi Praktis menuju Kelas dan Sekolah Inklusif.

Dirjen Dikti PPTA. Widati, S. dkk. (1999). *Kesiapan Guru Sekolah Umum Dalam Mengajar ALB yang Sekolah di Daerah Binaan RBM se-Kodya Bandung*. Bandung. Jurusan PLB FIP IKIP (Laporan Penelitian).

Hidayat, Workshop "Pengenaln & Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) & Strategi Pembelajarannya" Balikpapan 25 Oktober 2009 – Hotel Pacific Diselenggarakan oleh Tempat Terapi untuk Anak HARAPAN KU, Ruko Kimia Farma Klandasan dan Parents Support Group (PSG) Balikpapan.

Ishizaka, Alessio., Labib, Ashraf., (2009), Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and Limitations, *ORInsight*, 22(4), p. 201–220.

Johnsen, Berit H. 1998. Curricula for the Plurality of Individual Learning Needs. Some Thoughts Concerning Practical Innovation towards an Inclusive School. Lecturing paper presented at "Pedagoska Akademija", Sarajevo, September 17.

Kustawan, D. (2012). *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima

Natawidjaja, R. (1998). *Pengembangan Instrumen Penelitian*. Bandung. Depdikbud: IKIP. *Needs Education*. Paris, UNESCO.

- Peraturan Menteri Pendidikan Republic Indonesia, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang *Pendidikan Luar Biasa*.
- Pergub Aceh no. 88, tahun 2012, tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*
- Reynold, M. & And Brich. (1998). *Adaptive Mainstreaming*. New York: Longman.
- Situmorang, J. (2008). Pendidikan inklusi di Indonesia peluang dan tantangan.
http://jamisten.wordpress.com//2008/12/10/pendidikan_inklusi/ (12 Juli 2014)
- Smith, D. (2006). Inklusi sekolah ramah untuk semua. Bandung : Nuansa
- Sunardi. (1997). *Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta. Depdikbud.
- Toto bintoro. 2004. *Pendidikan Inklusi*. Republika online : <http://www.republika.co.id>
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special*